

Judul : Mau revisi UU Sisdiknas, DPR terima beragam masukan
Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Mau Revisi UU Sisdiknas, DPR Terima Beragam Masukan

Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Hingga kini Komisi X DPR RI masih menerima banyak masukan terkait RUU Sisdiknas. Masukan dari berbagai lembaga, pemerhati pendidikan, dan stakeholder lainnya. Selain itu, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, yakni masalah pendidikan keagamaan maupun

pondok pesantren. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025) mengatakan, Undang-Undang Pesantren termasuk dalam bagian yang akan dievaluasi dan diperkuat dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Revisi UU Sisdiknas ini akan mempertegas posisi pendidikan keagamaan, termasuk

pesantren, agar semakin diakui dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Menurut Hetifah, rencananya akan ada satu bab tersendiri mengenai Jenis Pendidikan Keagamaan dan Jenis Pendidikan Pesantren (BAB VI) dalam draf Revisi UU Sisdiknas nantinya. Penguatan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas akan memberikan sejumlah

keuntungan strategis bagi lembaga pendidikan berbasis agama. "Terutama dalam memastikan kesetaraan, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, termasuk pesantren, madrasah, serta lembaga pendidikan berbasis agama lainnya," kata dia. Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengharapkan agar pendidikan

karakter pesantren masuk dalam RUU Sisdiknas. "Kami akan mendorong," katanya. Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul memandang kurikulum pesantren perlu diakomodir. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Lalu Hadrian Irfani dan Iman Zanatul Haeri terkait usulan pendidikan pesantren masuk dalam kurikulum nasional.

LALU HADRIAN IRFANI,
Wakil Ketua Komisi X DPR

Pendidikan Karakter Pesantren Perlu Masuk



“Ponpes merupakan tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, yakni gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati terus tumbuh dan hidup.

RUU Sisdiknas masih digodok di DPR, apakah pendidikan pesantren bisa masuk kurikulum nasional? Kami mengharapkan agar pendidikan karakter yang ada di Pondok Pesantren (Ponpes) diadopsi sekolah umum. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan dikritik memasukkan pendidikan karakter ke kurikulum pendidikan nasional. Misanya, etika, adat moral, sopan santun, dan menghargai guru itu harus menjadi contoh dari pendidikan pendidikan umum.

Sebagai pimpinan Komisi X, apakah akan mendorong di RUU Sisdiknas? Kami akan mendorong itu masuk ke kurikulum pendidikan nasional.

Karena Anda begitu keukeuh? Karena Ponpes merupakan tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, yakni gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati terus tumbuh dan hidup. Bangsa sekarang perlu kembali belajar adat dari pesantren melalui kiai. Ponpes juga merupakan tempat sakral yang masih mengajarkan kekeluargaan di tengah modernitas.

Selain itu, apa lagi yang akan didorong dalam RUU Sisdiknas? Dalam upaya merawat kehormatan ponpes, Komisi X DPR RI bakal mempertegas posisi pendidikan pesantren dalam Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan payung hukum itu diperlu-

kan agar negara betul-betul mengakui keberadaan hingga hak dari ponpes. Dan insyaallah kami akan memperjelas posisi pendidikan pesantren, agar apa yang betul-betul diakui oleh negara, hak-haknya disamakan dengan hak-hak dari pendidikan. Saya yakin dan percaya pondok pesantren yang hari ini terus tegak berdiri tetap berkomitmen untuk terus membimbing mendidik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Harapan Anda? Kami berharap Pemerintah benar-benar hadir untuk ponpes. Negara tidak boleh mengabaikan peran ponpes dalam melahirkan banyak pemimpin hingga para pemikir Tanah Air. ■REN

IMAN ZANATUL, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan & Guru (P2G)

Status Guru Pesantren Harus Dibikin Jelas



“Aturan ini harus menjawab kesenjangan di pesantren dengan memberi pengakuan jelas terhadap status guru pesantren, pengasuh asrama, dan tenaga pengabdian.

Ada dorongan agar pendidikan pesantren masuk dalam RUU Sisdiknas. Bagaimana pendapat Anda? RUU Sisdiknas memang harus bisa menjawab pondok pesantren karena Undang-Undang Pesantren saat ini dirasa belum begitu efektif terhadap orang-orang yang bekerja di pondok pesantren.

Apakah mungkin kurikulum pesantren masuk dalam RUU Sisdiknas? Pesantren itu terbentuk dari beberapa aspek, bukan hanya pendidikan saja tetapi gabungan antara pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Inilah mengapa kemudian Undang-Undang Sisdiknas agak ke-

sulitan untuk menarik pendidikannya saja karena ada ekonomi juga, ada kesejahteraan dan lain sebagainya.

Ke depan, apakah memang perlu diatur soal pendidikan pesantren, ya? Menurut kami sangat perlu sekali mengakomodir pondok pesantren dengan rigid dan jelas. Apa sih standar guru pesantren. Berapa gaji yang mengelola asrama, yang hafalan al Qurannya setiap hari, lalu membangunkan anak-anak didiknya. Kita kira batasannya di mana antara pengabdian dan juga gaji pokok dan lain sebagainya.

Ini saya kira hal yang kadang tidak dibahas dan saya berharap bahwa Undang-Undang Sisdiknas akan

memperjelas ini sehingga pesantren yang usianya sudah ratusan tahun ini akan menjadi warisan budaya yang tetap hadir dan juga bisa menyelesaikan dan juga membantu masalah pendidikan di Indonesia.

Harapan Anda dalam RUU Sisdiknas yang tengah dibahas di DPR? RUU Sisdiknas harus menjawab kesenjangan di pesantren dengan memberi pengakuan jelas terhadap status guru pesantren, pengasuh asrama, dan tenaga pengabdian. Keberadaan pesantren adalah jasa yang belum dibayar oleh negara. Undang-Undang baru harus menjamin hak mereka, termasuk gaji, standar mutu, dan pengawasan. ■REN